Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



cipta

Ha

~

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**BAB V** 

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5. Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Ling-

## kungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Dalam mewujudkan Kota Layak Anak dalam sistem pembangunan suatu widayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usahayang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam semua bidang pembangunan dibuat standart 31 indikator KLA sesuai peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 yang dibagi 5 klaster diantaranya a klaster hak sipil dan kebebasan, klaster hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster hak Kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster hak pendidikan; pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta klaster hak perlindungan khusus. Terdapat indikatorindikator yang mendukung dari Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif di Kota Pekanbaru, antara lain yaitu:

## 5.1.1 Isi Kebijakan

Isi kebijakan menjadi bagian dari indikator yang memuat tentang bagaimana suatu keputusan urusan publik yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Isi kebijakan arif Kasim Riau

62



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

S

uska

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

konten kebijakan ini dipaparkan meliputi kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajata perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang dilibatkan.

## 5.1.1.1 Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi kebijakan merupakan salah satu poin penting guna mencapai keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Terdapat hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan ibuk Reli Sugiarti selaku kasi pemenuhan hak anak, tanggapan isi kebijakan yaitu sebagai berikut:

"Kepentingannya kan banyak ya kalo dilihat dari indikator klaster lingkungan keluarga dan pngasuhan alternatif ini seperti persentase usia perkawinan, tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga, tersedia lembaga kesejahteraan anak. Jadi, kebijakan-kebijakan ini berkaitan dengan OPD terkait seperti yang saya sebutkan tadi mislanya tersedia lembaga konsultasi bagi orang atau keluarga itu memliki keterkatiannya dengan kebijakan yang ada dari OPD kami sebagai OPD pengampu kita punya kebijakan adanya PUSPAGA. Jadi, kebijakan itu kita sinkronisasikan dan koordinasikan dengan OPD terkait". (Wawancara, 16 Mei 2024).

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menguraikan bahwa kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan ini memiliki komitmen untuk melaksanakan hak-hak dan kebutuhan anak khususnya terkait pada klaster lingkungan keluarga di Kota Pekanbaru. Komitmen dari setiap masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terhadap kewajibannya dalam melaksanakan kebijakan menjadi hal penting terhadap pelaksanaannya. Dengan adanya keterkaiatn masing-masing OPD bisa dilihat sejauh mana kepentingan tersebut mem-

## © Hak cipta milik UIN Suska

N

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

bawa pengaruh terhadap implementasinya. Berikut penyataan dari Ibuk Reli Sugianti selaku kasi pemenuhan hak anak terkait sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh, yaitu:

"Ada pengaruhnya banyak, karena Kota Layak Anak (KLA) ini berdampak pada hal yang positif. Keterkaitan ini ada beberapa OPD yang dilibatkan dan kita punya SK gugus KLA disana ada yang kita libatkan dengan masing-masing klaster" (Wawancara, 16 Mei 2024).

Hal diatas semakin diperkuat dengan pernyataan dari tenaga bagian pemenuhan hak anak, sebagai berikut:

"Saat ini sangat berpengaruh, apa saja kebijakan yang dikeluar-kan terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif itu misalnya ada layanan puspaga juga yang tak kalah penting dari klaster itukan ada pengasuhan alternatif. Anak-anak saat ini ynag tidak memiliki orang tua atau yang memiliki kekurangan dilindungi oleh negara melalui upt atau panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah" (Wawancara, 30 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menguraikan bahwa kepentingan yang mempengaruhi kebijakan KLA terkait klaster lingkungan keluuarga dan pengasuhan alternatif ini sudah membawa pengaruh terhadap pelaksanaannya. Terdapat pernyataan yang peneliti lakukan melalui wawancara dari pihak orang tua terkait sejauh mana kepentingan kebijakan KLA ini membawa pengaruh terhadap implementasinya, yaitu:

"Orang tua punya konsep mengasuh anak harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah biar ada sinergi. Ketika kita membuat satu norma dirumah dalam lingkungan kecil itu enaknya didukung oleh lingkungan besar salah satunya itu kebijakan pemerintah itu tadi, misal contoh adanya ruang publik untuk anak kalau tidak ada kebijakan maka yang tadi itu tidak akan muncul, karena kalau pemerinntah sudah buat ya inilah semuanya memudahkan perkem-

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ha

~

cipta

milik

a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

bangan anak sesuai dengan konsep KLA itu " (Wawancara, 18 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menguraikan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi sudah sangat berpengaruh terhadap implementasinya, pihak orang tua sangat terbantu dan merasa terbantu dengan adanya program KLA ini khususnya pada klaster lingkun kun s ku kungan keluarga dan pengasuhan alternatif.

## Tipe manfaat Z

Tipe manfaat dalam isi kebijakan menunjukkan bahwa dalam keberhasilan dari satu kebijakan dapat dilihat dari manfaat yang banyak manfaat kebijkan harus mampu kelompok sasarannya, terhadap diinterpretasikan kemudian dikomunikasikan kepada para pelaksana yang menjadi implementor dalam suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil dilapangan yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan ibuk Reli Sugianti, SKM selaku kasi pemenuhan hak anak mengenai tipe manfaat, yaitu:

"Manfaatnya pasti ada, adanya keterkaitan saling berkoordinasi antara OPD terakit. Jadi, progam-prorgam kami dan program mereka nanti disesuaikan sehingga nanti ada tanggungjawab untuk melaksakana kota layak anak ini. Dengan sampai saat ini sudah familiar dengan kondisi kota layak anak karena kota layak anak ini setiap tahunnya melakukan penilaian-penilaian" (Wawancara, 16 Mei 2024)

Pernyataan lain mengenai manfaat adanya program KLA ini juga dirasakan oleh pihak orang tua dan forum anak. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak orang tua, yaitu:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha

~

cipta

milik

S Sn

Ka

N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

"Sangat memberi manfaat ya kami selaku pihak orang tua, semuakan harus layak anak sekolahnya harus ramah anak lingkungan harus ramah anak yang aman, anak merasa nyaman, terjaga. Tidak ada yang terganggu misalnya disuatu ruangan tidak merokok jadi anak-anak tidak merasa ganggu" (Wawancara, 18 Mei 2024)

Pernyataan dari pihak orang tua sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Putri anggota forum anak mengenai tipe manfaat, yaitu:

"Intinya dari forum anak itu sendiri dengan adanya program kota layak anak sangat merasakan dampak yang besar terkait dengan sekolah ramah anak, lingkungan ramah anak. Dengan adanya program KLA inilah kita merasakan semisal ada panti asuhan yang kurang sesuatu nah di KLA inilah kita merasakan dampak adanya bantuan. Lalu ditaman-taman budaya juga, kami selaku forum anak selalu memperhatikan taman-taman budaya yang layak untuk anak. Itu selama ini yang manfaat yang dirasakan forum anak dengan adanya program kota layak anak ini" (Wawancara, 18 Mei 2024)

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Nisa anggota forum anak beliau mengatakan:

"Kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan putri dengan adanya kota layak anak ini pemerintah melakukan kegiatan yang berinteraksi langsung dengan anak. Jadi, dengan adanya kota layak ini ya anak-anak lebih diperhatikan" (Wawancara, 18 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat menguraikan pihak orangtua dan forum anak sangat merasakan manfaat yang positif dengan adanya program kota layak anak ini terkhususnya pada klaster lingkungan keluarga yang mana pihak orang tua merasa sangat terbantu dan anak-anak sangat diperhatikan.



## ~ cipta milk UIN S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## uska N a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

## <u>5</u>.1.1.3 Derajat perubahan yang diinginkan

Dalam isi kebijakan akan dijelaskan seberapa besar perubahan yang akan dihasilkan dari implementasi. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut harus dirumuskan secara jelas, spesifik dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Berikut hasil wawancara dengan ibuk Reli Sugianti selaku kasi pemenuhan hak anak, yaitu:

> "Tentu ada perubahan di masing-masing OPD misalnya keterlibatan dinas lain dulu mungkin mereka tidak menyiapkan sarana tempat bermain anak seperti taman-taman hijau dengan kondisi adanya program dari kami yang turunan dari kementerian mereka udah membuatkan taman yang didesain dengan SOP. Ada indikator-indikator yang sudah ditentukan yang harus dipenuhi, termasuk indikator pada klaster kedua ini persentase usia perkawinan, tersedia lembaga konsultas<mark>i bagi orang tu</mark>a atau keluarga dan tersedianya lembaga kesejahteraan anak. Dari indikator tersebut sudah ada yang terpenuhi terkait dengan kasus pernikahan masih adanya laporan yang masuk tetapi kami terus mengupayakan agar terselesaikan" (Wawancara, 16 Mei 2024).

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menguraikan seberapa besar perubahan terkait dengan adanya program kota layak anak ini. Perubahan inilah yang membuat program kota layak anak bisa terus memberikan dampak positif pada masyarakat. Tetapi masih adanya kasus setiap tahunnya mengalami peningkatan terkait kasus pernikahan anak namun pihak dinas terus berusaha agar terselesaikan. Dalam menangani hal tersebut dp3apm dan opd terkait dibantu dengan unit layanan dengan adanya UPT.PPA, adanya layanan puspaga serta terus melakukan sosialiasi kepada masyarkata. Pernyatan tentang perubahan yang ada mengenai kebijakan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Ha ~ cipta milik S Sn Ka Z a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KLA terkait klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif juga disampaikan oleh tenaga bagian pemenuha hak anak yang mengatakan:

> "Perubahannya dengan adanya KLA ini yang berisi tentang kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya pemenuhan hak anak salah satunya terkait klaster kedua ini yaitu yang tadi dijelaskan adanya layanan puspaga. Semakin banyak dengan adanya layanan tersebut semakin banyak keluarga dan anak yang mengerti, yang mau bercerita, berkonsultasi mengenai permasalahan maupun keluhannya. Karena sebelum itu tidak ada platform untuk melaporkannya, tidak ada layanan untuk melaporkannya. Jadi, dengan adanya layanan tersebut ya pemenuhan hak anak dan kebiakan kota layak anak dapat diimplementasikan dengan baik" (Wawancara, 30 Mei 2024).

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menguraikan bahwa sejauh ini perubahan yang diinginkan sudah cukup baik dalam proses implementasinya. Dari yang sebelumnya pihak keluarga dan anak yang snagat sulit untuk melaporkan dan dengan adanya kebijakan kota layak anak ini terkhususnya pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif pihak keluarga dan anak tidak kesulitan dan tidak ketakutan dalam memberikan laporan mengenai permasalahannya.

Derajat perubahan yang ingin dicapai pada program kota layak anak klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif yang meliputi beberapa indikator yaitu:

Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun Perkawinan pada anak di Kota Pekanbaru masih tergolong tinggi dengan data yang menunjukkan pada tahun 2021 berjumlah 39 orang dan mengalami peningkatan pada tahun 2022



## Ha ~ cipta milik S Sn Ka

Z a

of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

berjumlah 90 orang. Hal ini menunjukkan kurang kesadaran dari masyarakat untuk mencegah perkawinan di bawah umur 18 tahun.

Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua atau keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak

Pihak kota Pekanbaru telah menyediakan lembaga konsultasi bagi pihak orang tua yaitu PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang memiliki tujuan sebagai unit layanan terpadu satu pintu terkait permasalahan keluarga dan anak. Pihak orang tua sangat terbantu dengan adanya layanan PUSPAGA untuk lebih mudah berkonsultasi terkait dengan permasalahanpermasaalahan yang dihadapi pihak orang tua dan anak.

Tersedia lembaga kesejateraan sosial anak

Kota Pekanbaru telah memiliki sejumlah lembaga kesejahteraan sosial anak yang secara langsung dinaungi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak dengan melaksanakan penyantunan, memenuhi kebutuhan serta hakhak anak.

## State Islamic University 5.1.4 Letak pengambilan keputusan

Pada poin ini menjelaskan mengenai letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Hal ini dikarenakan pengambilan keputusan memegang peranan penting dalam pelaksanaan

# © Hak cipta milik UIN Suska Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: suatu kebijakan. Berikut hasil wawancara dengan ibuk Reli Sugianti, SKM selaku kasi pemenuhan hak anak terkait letak pengambilan keputusan, yaitu:

"Letak pengambilan keputusannya ada di Sekda selaku PJ gugus tugas KLA dan kami OPD selaku pelaskana dalam menjalankan atau melaksanakan program dari pusat ini yaitu Kota Layak Anak. Yang jelas kita memberikan hak-hak anak itu, khususnya pada klaster kedua ini tentang hak anak salah satunya untuk bisa bermain diluar rumah mereka seperti yang disediakan pemerintah yaitu ruang taman hijau/RTH" (Wawancara, 16 Mei 2024)

## Gambar 5.1 Ruang Taman Hijau (RTH)



Sumber: Dokumentasi DP3APM Kota Pekanbaru, 2023

Adapun hasil wawancara dengan tenaga bagian pemenuhan hak anak mengenai letak pengambilan keputusan, yaitu:

"Landasannya ya pasti kalau kita prinsipnya kepentingan yang terbaik bagi anak terus juga non diskriminasi. Karena, anak itu mesti dilindugni dan oleh siapa saja dan dimana saja" (Wawancara, 30 Mei 2024).

Pernyataan berupa tanggapan dari Nisa selaku anggota forum anak terhadap letak pengambilan keputusan dalam kebijakan KLA ini, yaitu:

"Sejauh ini mengenai kebijakan KLA kami selaku forum anak tidak menentang karna suatu mekanis KLA ini masuk dalam prinsip Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha ~ cipta milik UIN Sus Ka

Z

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kami yaitu sebagai 2P (Pelapor dan Pelopor) dan masuk juga dalam prinsip kementerian dimana segala aspek-aspek mengenai hak sipil kebebasannya, pengasuhan alternatifnya dan aspek lainnya. Tidak merasakan kegagalan terhadap KLA ini dapat kita lihat banyak pembangunan-pembangunan yang baru yang diperuntukan untuk anak" (Wawancara, 18 Mei 2024).

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menguraikan bahwa letak pengambilan keputusan adanya peran pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan yang mendukung pihak orang tua atau keluarga dalam mengasuh anak-annak. Keputusan juga dipengaruhi oleh respon dati masyarakat dan forum anak dalam mengidentifikasi kebutuhan dan solusi untuk mendukung keluarga dalam pengasuhan anak.

## 5.1.1.5 Pelaksana Program

Implementor yang memilki kemampuan dan komitmen yang kuat menentukan kebijakan tersebut berhasil, karena pelaksana program merupakan bagian dari suatu penggerak untuk mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Berikut hasil wawancara dengan kasi pemenuhan hak anak yaitu:

"Pihak yang terlibat dalam pelaksaan program kla ini ya yang sesuai dengan SK tim gugus kla, sekda selaku ketuanya dan opd terkait. Jadi peran setiap masing-masing opd itu ada tentang kebijakan kla dan setiap masing-masing klaster" (Wawancara, 16 Mei 2024).

Hal sama juga disampaikan oleh petugas bidang pemenuhan hak anak terkait pelaksana program, yaitu:

"Semua pihak yang terlibat ikut andil dan bekerjasama dalam melaksankan program kota layak ini., semua sudah ada tupoksinya



## Ha ~ cipta milik UIN

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

masing-masing dalam melaksanakannya" (Wawancara, 30 Mei 2024)

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan pelaksana program merupakan keseluruhan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program kota layak anak tanpa terkecuali, artinya masingmasing opd yang terlibat ikut bekerjasama dalam program ini terkhusunya pad pad 5.1.1.6 pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ini.

## Sumber daya yang dilibatkan Z

Keberhasilan dari suiatu kebijakan dapat dilihat dari sumber dayanya, bahwa sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berfungsi secara efektif, yang berarti sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Berikut hasil wawancara megenai sumber daya yang terlibat dengan ibuk Reli Sugianti, SKM selaku kasi pemenuhan hak anak, yaitu:

> "Ini programnya memang program kementerian turunan ke provinsi kabupaten kota. Seperti dp3apm sebagai dinas pengampu didukung oleh sumber daya manusianya yang menjalankan semua program yang memang harus dilaksanakan. Nah program tersebut menggunakan anggaran dan memang itu merupakan tugas pokok dan fungsi oleh SDM itu tersebut dan ada program yang memang tidak bisa kita laksanakan tanpa anggaran atau harus pakai anggaran tetapi ada kegiatan program yang memang wajib dilaksanakan tidak dengan anggaranpun itu harus jalan yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia. (Wawancara, 16 Mei 2024).

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menguraikan dalam program KLA ini sendiri telah sepenuhnya didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia dan anggaran. Adapun hasil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

8 ~

cipta

milik

S Sn

Ka N

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wawancara peneliti dengan pihak orang tua mengenai sumber daya dalam program kota layak anak, yaitu:

> "Sumber daya yang dilibatkan sudah cukup baik tetapi belum ideal karena ya masih bisa kita lihat aja masih ada sumber daya manusianya yang kurang memahami dalam pelaksanaanya" (Wawancara, 18 Mei 2024).

Hal lain juga disampaikan oleh Putri selaku anggota forum anak yang mengatakan:

> "Sumber dayanya sudah memadai ya tetapi masih belum optimal sepernuhnya kak khususnya SDM karena kota layak anak ini tidak hanya disatu dinas tetapi melibatkan dinas lain. Jadi kalau dibilang sudah memadai ya sudah termasuk juga dengan anggaran, tapi sebenernya kalau dihitung-hitung kita tidak tau dan tidak memastikan anggraan itu berapa tapi tergantung balik ke kita, jadi selagi ada jalan dan kerja sama diantara banyak dinas pasti semuanya akan terlaksana" (Wawancara, 18 Mei 2024),

Dari hasil wawancara diatas yang peneliti lakukan dengan pihak orang tua dan forum anak selaku kelompok sasaran dari kebijakan kota layak anak pada sumber daya yang dilibatkan baik dari segi sumber daya manusianya, anggaran serta fasilitas dari kebijakan kota layak anak tersebut sudah baik tetapi belum sepenuhnya maksimal terkhususnya pada sumber daya manusia yang masih belum sepenuhnya memahami. Masih terdapat beberapa masalahyaitu belum optimalnya penyelenggaraan hakhak anak anak sebagaimana yang tergantung dalam undang undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014, meningkatnya kasus anak-anak yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, akibat penelantaran baik secara fisik maupun psikis, sehingga mengakibatkan anak-anak tidak mampu tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya anak-anak lain yang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

# © Hak cipta milik UN Suska Ria

sudah mendapatkan perlindungan, belum optimlanya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari banyaknya anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar. dan masih ditemukannya perkawinan pada usia

## .1.2 Lingkungan Implementasi

anak di Kota Pekanbaru

## 5.1.2.1 Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Proses implementasi kebijakan juga harus memperhatikan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakn tersebut. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka akan sulit mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beriku hasil wawancara dengan ibuk Reli Sugianti, SKM selaku kasi pemenuhan hak anak yang mengatakan:

"Terkait dengan kekuasaan, kebijakan ini sifatnya turunan dari pusat kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, kita kan punya SK gugus tugas KLA dimana disitu keterlibatan sekda selaku ketuanya dan opd lainnnya selaku pelaksana dari kebijakan kota layak anak ini dan kalau dilihat srategi para pelaksananya ya kami sudah memberikan bentuk pelayanan yang sudah memenuhi pemenuhan hak anak seperti sekolah ramah anak, adanya rth atau ruang bermain ramah anak"(Wawancara, 16 Mei 2024).

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menguraikan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat dalam kebijakan kota layak anak merupakan turunan dari pusat yang kemudian dilaksanakan oleh OPD kota pekanbaru, bentuk strategi para aktor juga

# State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## © Hak cipta milik UIN Sus

Ka

Ria

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

sudah memiliki komitmen dalam melaksanakan kebijakan agar bisa lebih baik lagi.

## 5.1.2.1 Karakeristik lembaga dan penguasa

Karakteristik lembaga dan penguasa juga menjadi poin penting terhadap proses implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan juga memerlukan dukungan baik secara moril dan materill dari pemerintah. Berikut hasil wawancara dengan ibuk Reli Sugianti, SKM selaku kasi pemenuhan hak anak mengatakan:

"Karakteristiknya macam-macam ya disesuaikan dengan program yang ada dan tidak ada pun kita upayakan itu ada. Tetapi yang mendukung dalam kebijakan kota layak anak" (Wawancara, 16 Mei 2024).

Pernyataan yang sejalan dengan hal tersebut juga disampaikan oleh petugas bagian pemenuhan hak anak yang mengatakan:

"Karakteristik dari kami sebagai tim gugus kota layak anak kami sangat terbuka karena ini menjadi target dan programnya pemerintah pusat. Kita selaku instansi yang ada didaerah mesti mendukung setiap apapun programnya terkhusunya kota layak anak ini. Terkait karakteristik individunya masih kurang responsif, baik dari stakholdernya, forum anak dan pihak yang terlibat lainnya" (Wawancara, 30 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa karakteristik dari lembaga dan penguasa masih kurang responsif dalam melaksanakan kebijakan, serta disesuaikan dengan program kota layak dan berkomitmen tinggi hal ini terbukti dengan penghargaan predikat kota layak anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.



Ha

~

cipta milik UIN

Suska

N a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 5.1.2.2 Kepatuhan dan daya tanggap

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap aktor-aktor yang terlibat menjadi poin penting dalam sebuah proses implementasi kebijakan. Oleh karena itu, poin ini berisi penjelasan serta gambaran sejauhmana kepatuhan dan daya tanggap para aktor yang terlibat. Berikut hasil wawancara dengan ibuk Reli Sugianti, SKM selsku kasi pemenuhan hak anak, yaitu:

"Kepatuhan dan daya tanggapnya rata-rata mereka paham ya tentang kla ini, tetapi karena ini bukan program mereka melainkan program dari pusat jadi ada sedikit beban tetapi mau tidak mau itu adalah kerja bersama karena intinya, sekda selaku ketua gugus kla bisa menjembatani antara masing-masing opd untuk saling bekerjasama" (Wawancara, 16 Mei 2024).

Pernyataan yang sejalan juga disampaikan oleh petugas baian pemenuhan hak anak yaitu:

"Sejauh ini sudah sangat patuh. Kita pastinya melaksanakan sesuai dengan prinsip atau kebijakan kota layak (Wawancara, 30 Mei 2024).

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dan daya tanggap para aktor sudah cukup baik tetapi masih belum optimal, hal ini ditujukan masih ada kurangnya respon dari opd masing-masing klaster. SUSKA RIAU